

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengendalian Intern**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pengendalian Intern**

Pengendalian intern menjadi salah satu bagian pada suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan operasional organisasi tersebut. Pengendalian intern yang bagus amat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan organisasi/perusahaan. Struktur pengendalian intern juga mempengaruhi kegiatan operasional organisasi/ perusahaan.

Sistem pengendalian internal ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 60 th 2008.

Mulyadi (2014) mengatakan system pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern ialah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan/ peraturan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh semua karyawan perusahaan yang dinyatakan oleh hery (2014).

Sesuai definisi pemaparan di atas maka maksud tersebut bisa menyimpulkan pengendalian internal ialah metode yang terstruktur dari berbagai komponen pengendalian yang terintegrasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi agar tercipta keandalan pelaporan keuangan, efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Menjaga kekayaan organisasi dan mematuhi keputusan manajemen.

#### **2.1.1.2 Sasaran Pengendalian Intern**

PP Republik Indonesia No. 60 Th 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan jika pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efiseinsi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran pengendalian intern menurut Mulyadi (2016) yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi

Pengolahan kegiatan perusahaan diperlukan untuk memperoleh informasi yang teliti, tepat waktu dan dapat dipercaya.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Kemungkinan aset milik perusahaan rusak dikarenakan musibah maupun kecelakaan, dicuri serta disalahgunakan sehingga memerlukan pengawasan yang baik.

3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional perusahaan

Pencegahan untuk menghindari berbagai peristiwa yang terjadi dan kondisi yang menimbulkan unefisiensi operasional manajemen membutuhkan mekanisme pengawasan maupun pengendalian intern.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Mekanisme pada system pengendalian intern ditetapkan untuk dipatuhi oleh perusahaan dan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.

### 2.1.1.3 Bagian-bagian Sistem Pengendalian Intern

Bagian sistem pengendalian internal bermanfaat menjadi petunjuk kegiatan dan tolok ukur efektifitas kegiatan sistem pengendalian intern. Juga membutuhkan pertimbangan aspek biaya manfaat, Asal daya manusia, kriteria untuk mengukur efektifitas secara komprehensif. Sesuai PP Republik Indonesia No. 60 Th 2008 pengendalian internal mempunyai bagian-bagian yaitu :

a) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian dibutuhkan untuk menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam penerapan pengendalian internal yang harus dilakukan oleh kepala instansi pemerintah dalam lingkungan kerjanya.

b) Penilaian resiko

Penilaian adalah resiko pelaksanaan penilaian bila kesempatan terjadi sesuatu yang menakutkan tercapainya sasaran dan target instansi pemerintah. Yaitu identifikasi resiko dan analisis resiko.

c) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan aksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan resiko dan melaksanakan kebijakan dan cara agar meyakinkan bahwa tindakan menyelesaikan resiko telah dilakukan dengan mengena.

d) Informasi dan komunikasi

Penyelenggaraan tupoksi instansi pemerintah dari data yang telah diolah digunakan dalam mengambil keputusan.

e) Pemantauan

Metode penilaian dalam system pengendalian intern atas bobot kerja maupun cara untuk mendapatkan keyakinan dalam penannganan segera pada evaluasi dan temuan audit.

Unsur-unsur pengendalian internal bisa disimpulkan bahwa diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional instansi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kelima unsure system pengendalian internal. Peningkatan pelayanan pada instansi pemerintah perlu diterapkan dengan pengendalian internal.

## 2.1.2 Lingkungan Pengendalian

### 2.1.2.1 Pengertian Lingkungan Pengendalian

Kepala instansi harus melaksanakan dan menerapkan perilaku baik lingkungan pengendalian yang kondusif ialah pernyataan PP Republik Indonesia No. 60 Th 2008. Susanto (2013) menerangkan kalau pengendalian internal ialah

pembentukan suasana organisasi serta memberikan kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi.

### **2.1.2.2 Fungsi Lingkungan Pengendalian**

Fungsi lingkungan pengendalian yaitu keadaan yang diciptakan dan dipelihara dalam lingkungan kerja sebagai motivasi untuk pegawai agar memberikan hasil terbaik dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan pengendalian bisa menimbulkan perilaku positif dalam lingkungan kerja. Memberikan suasana dan kesadaran bagi pegawai tentang perlunya pengendalian dalam instansi/organisasi sesuai penjelasan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008.

### **2.1.2.3 Indikator Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian mempunyai indikator sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, yaitu :

- a. Penegakan integritas dan nilai etik dilaksanakan dengan : 1) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah; 2) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
- b. Komitmen terhadap kompetensi dilakukan dengan : 1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan tupoksi di tiap-tiap posisi dalam instansi pemerintah; 2) Menyusun standar kompetensi bagi tiap tupoksi di tiap-tiap posisi dalam instansi pemerintah; 3) Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan agar membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaan.

- c. Adanya kepemimpinan yang kondusif ditunjukkan dengan : 1) Mempertimbangkan resiko dalam mengambil keputusan; 2) Menerapkan manajemen berbasis kinerja; 3) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP.
- d. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dilaksanakan, yaitu : 1) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkat tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan instansi pemerintah; 2) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain instansi pemerintah yang bersangkutan.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan asal daya manusia dilaksanakan dengan : 1) Penetapan kebijakan, prosedur sejak rekrutmen sampai pemberhentian pegawai; 2) Supervisi berkala yang memadai terhadap pegawai.

- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif wajib : 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tupoksi instansi pemerintah; 2) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tupoksi instansi pemerintah.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

### **2.1.3 Penilaian Resiko**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penilaian Resiko**

Kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah disebut penilaian resiko sesuai dengan PP Republik Indonesia no. 60 th 2008. Sedangkan Susanto (2013) menyatakan jika manajemen bertanggungjawab dalam menentukan resiko yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuannya, memperkirakan tingkat tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi pengaruhnya atau kemungkinannya.

#### **2.1.3.2 Fungsi Penilaian Resiko**

Penilaian resiko berfungsi untuk mengidentifikasi resiko potensial yang berasal dari internal maupun eksternal, serta untuk menilai sejauh mana menimbulkan dampak yang dapat mengganggu jalannya kegiatan dan tujuan instansi pemerintah.



Resiko yang berasal dari internal antara lain pegawai yang tidak mempunyai motivasi dan pegawai yang kurang terlatih. Resiko yang berasal dari eksternal antara lain kemajuan teknologi dan bencana alam.

### 2.1.3.3 Indikator Penilaian Resiko

Penilaian resiko dalam PP Republik Indonesia no. 60 th 2008 mempunyai indikator, yaitu :

#### 1. Identifikasi resiko

Penggunaan metodologi yang sama agar sasaran instansi pemerintah dapat diidentifikasi resikonya. Menggunakan mekanisme yang sama dalam mengenali resiko dari faktor luar dan faktor dalam. Peningkatan resiko dapat dinilai dari faktor yang lain. identifikasi resiko dilakukan oleh tim audit internal puskesmas.

#### 2. Analisis resiko

Penentuan efek resiko yang telah diidentifikasi dalam mencapai tujuan instansi pemerintah dalam analisis resiko. Penerapan prinsip kehati-hatian pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan untuk menentukan tingkat resiko yang bisa diterima. Tim audit internal melakukan identifikasi resiko lalu membuat analisis resiko dan tindak lanjutnya, kemudian dilaporkan kepada pimpinan.

Penilaian resiko sebagai unsur kedua dari pengendalian internal. Penilaian resiko dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang bisa menghalangi kegiatan operasional instansi/organisasi. Penilaian resiko dilaksanakan secara periodik agar meminimalkan resiko yang akan terjadi.

## **2.1.4 Kegiatan Pengendalian**

### **2.1.4.1 Pengertian Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian sesuai dengan PP Republik Indonesia no. 60 th 2008 ialah aksi yang dibutuhkan agar penyelesaian resiko dan penetapan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan menyelesaikan resiko sudah dilakukan secara efektif. Sedangkan menurut Hery (2013) aktifitas pengendalian ialah kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan resiko yang telah digunakan mencapai tujuan entitas.

### **2.1.4.2 Fungsi Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian mempunyai fungsi sebagai alat ukur dan arah kinerja actual dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh instansi sesuai dengan yang telah ditetapkan secara tertulis. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dengan melakukan pemisahan tugas agar pegawai bertanggung jawab atas

tugasnya tersebut. Pelaksanaan operasional instansi/organisasi diawasi dan dievaluasi secara periodik untuk meningkatkan kualitas pengendalian.

#### 2.1.4.3 Indikator Kegiatan Pengendalian

Indikator kegiatan pengendalian sesuai dengan PP Republik Indonesia no. 60 th 2008 adalah :

- a. *Review* atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Membandingkan prestasi kerja dengan ketentuan prestasi kerja yang telah ditentukan.

- b. Pembinaan asal daya manusia.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka dirancang dan diarahkan pada sumber daya manusia.

- c. Pengendalian atas pengelolaan system informasi.

Pengendalian secara normal dan pengendalian aplikasi dilaksanakan secara periodik yang komprehensif

- d. Pengendalian fisik atas aset.

Pengendalian fisik dilaksanakan untuk memantau akses informasi kepada system informasi dan penegakan disiplin.

- e. Faktor dan ukuran prestasi ditetapkan dan di *review*.

Menetapkan, menata ulangserta melaksanakan pengecekan secara berkala atas konsisten dan terperceyastandar maupun kemampuan

- f. Memisahkan fungsi.

Menjaga semua pokok bagian agar tidak dipegang oleh satu (1) orang harus dilakukan oleh kepala instansi pemerintah.

- g. Memberi kekuasaan untuk kejadian penting dan transaksi yang dilakukan.

Seluruh pegawai wajib melaksanakan semua ketentuan maupun syarat yang telah ditetapkan dan dikomunikasikan oleh kepala instansi pemerintah.

- h. Pencatatan atas transaksi serta kejadian dilaksanakan dengan akurat dan tepat waktu.

Negosiasi dan peristiwa diklasifikasi dengan pas dan dilaksanakan pada periode Negosiasi maupun peristiwa

- i. Pemisahan akses atas asal daya dan penulisannya.

Kepala Instansi Pemerintah wajib memberitahukan pada pegawai yang berhak dan melaksanakan penataan ulang atas pemisahan dengan periodik.

- j. Pertanggungjawaban terhadap asal kekuatan dan pencatatannya.

Kepala Instansi Pemerintah harus memperkerjakan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan, pencatatan Asal daya secara periodik

- k. Penyimpanan yang bagus atas system pengendalian internal serta negosiasi dan peristiwa penting.

Kegiatan pengendalian diberlakukan supaya Asal daya instansi/organisasi dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan

kegunaannya. Pengendalian dilakukan agar sistem informasi maupun asset dapat terjaga dengan baik dalam penegakan disiplin. Pencatatan yang akurat dan akuntabilitas dilaksanakan secara periodik dan komprehensif.

## **2.1.5 Informasi dan Komunikasi**

### **2.1.5.1 Pengertian Informasi dan Komunikasi**

PP Republik Indonesia no. 60 th 2008 menerangkan jika informasi dan komunikasi ialah data yang bisa dipakai dan diolah untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan tupoksi instansi pemerintah. Informasi dan komunikasi sesuai dengan Azhar Susanto (2013) ialah informasi yang dibutuhkan seluruh level manajemen organisasi untuk mengambil keputusan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

Informasi diidentifikasi, diambil, diterima, diproses serta dilaporkan oleh system informasi agar didapat informasi yang berkualitas. Komunikasi sudah tercakup dalam system informasi. Komunikasi terjadi pula dalam bentuk tindakan manajemen. Komunikasi harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas dari manajemen bahwa karyawan harus melakukan pengendalian internal dengan serius.

### **2.1.5.2 Fungsi Informasi dan Komunikasi**

Fungsi Informasi dan Komunikasi yaitu untuk mengidentifikasi semua informasi yang diperlukan dalam

kegiatan operasional instansi/organisasi. Menulis dan mengkondisikan informasi dalam tatanan dan waktu yang sesuai dalam pengerjaan aktifitas di Instansi Pemerintah. Komunikasi dapat menyampaikan pesan yang jelas dan dipahami oleh pegawai untuk dilaksanakan dengan baik.

### **2.1.5.3 Indikator Informasi dan Komunikasi**

Indikator informasi dan komunikasi sesuai PP Republik Indonesia no. 60 th 2008 yaitu:

1. Sarana komunikasi maupun bentuknya dapat disediakan dan dimanfaatkan.
2. Sistem informasi dikelola, dikembangkan dan diperbarui secara terus menerus.

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan informasi yang diperlukan dalam semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan kegiatan operasional instansi/organisasi. Komunikasi dilakukan agar kegiatan operasional instansi/organisasi berjalan sesuai yang diharapkan. Memanfaatkan, mengelola dan memperbarui informasi dan komunikasi secara periodik.

## **2.1.6 Pemantauan**

### **2.1.6.1 Pengertian Pemantauan**

Pemantauan yang dinyatakan pada PP Republik Indonesia no. 60 th 2008 ialah temuan audit dan evaluasi yang ditindaklanjuti dalam proses penilaian mutu kerja serta memberikan keyakinan. Sedangkan sesuai dengan Hery (2013) pemantauan yaitu berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian intern secara berkesinambungan atau berkala oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan.

#### **2.1.6.2 Fungsi Pemantauan**

Fungsi pemantauan menurut Wikipedia Indonesia (2012) ialah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Pemantauan secara berkala untuk mengetahui apakah kegiatan operasional instansi/organisasi berjalan sesuai rencana apa tidak.

#### **2.1.6.3 Indikator Pemantauan**

Indikator pemantauan yang terdapat pada PP Republik Indonesia no. 60 th 2008 ialah :

1. Pemantauan berkelanjutan

Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pengelolaan rutin, pembandingan, rekonsiliasi, tindakan lain dan supervise.

2. Evaluasi terpisah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :
  - a. Sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan evaluasi terpisah , menguji efektivitas serta penilaian sendiri.
  - b. Aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak luar pemerintah bisa melakukan evaluasi terpisah.
  - c. Penggunaan daftar uji dalam pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan evaluasi terpisah.

### 3. Tindak Lanjut

Pelaksanaan dan penyelesaian dalam tindak lanjut hasil audit dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi yang telah ditetapkan pada hasil audit.

Peneliti dapat menyimpulkan pemantauan secara berkala sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasional instansi/organisasi. Evaluasi kegiatan operasional untuk mengetahui mutu kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya. penyusunan Hasil evaluasi dilaksanakan agar dapat segera ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

## 2.1.1 Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah



### 2.1.1.1 Pengertian Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan

#### Umum Daerah

Kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan penyusunan laporan keuangan dengan informasi yang diberikan dan bermanfaat untuk pengguna laporan tersebut. PP Republik Indonesia no. 71 th 2010 menerangkan tingkat kejelasan laporan keuangan, yaitu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan pada entitas pelaporan.

Mardiasmo (2001) menjelaskan lembaga pemerintah dituntut untuk bisa membuat laporan keuangan eksternal yang mencakup laporan keuangan formal seperti laporan surplus deficit, LRA, LAK dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dengan ukuran financial dan financial. Menghasilkan laporan keuangan dari proses akuntansi keuangan dan sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan / organisasi pembuat laporan dan aktivitas-aktivitas.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2015 menjelaskan jika laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya LAK atau laporan

arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Definisi di atas bisa di ambil kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah Hasil proses pencatatan transaksi dalam jangka waktu tertentu yang berisi informasi keuangan dan aktifitas perusahaan/instansi agar memberikan uraian tentang situasi keuangan dan kinerja perusahaan/instansi.

#### **2.1.6.4 Karakteristik Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan**

##### **Umum Daerah**

Kualitas pelaporan keuangan mempunyai karakteristik yang menjadi ukuran normative untuk memberikan berita akuntansi untuk melengkapi tujuannya. PP Republik Indonesia no. 71 th 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menguraikan ada empat cirri khas kualitas laporan keuangan, ialah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

##### **a) Relevan**

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan bila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lampau atau masa kini dan memprediksikan masa depan serta menegaskan / mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lampau. Informasi laporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan yaitu :

1. Mempunyai faedah umpan balik (*feedback value*)

Ekspansi di masa lampau memungkinkan pengguna dalam mengoreksi ataupun menegaskan informasi.

2. Mempunyai faedah prediktif (*predictive value*)

Hasil masa lampau dan peristiwa masa sekarang bisa sebagai informasi untuk membantu pengguna memprediksi masa depan yang sesuai.

3. Tepat waktu

Berpengaruh dalam mengambil keputusan jika informasi disajikan tepat waktu.

4. Lengkap

Semua informasi akuntansi bisa mempengaruhi dalam mengambil keputusan dengan menyajikan informasi akuntansi keuangan pemerintah secara lengkap. Agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat diminimalkan dengan mengungkapkan pada setiap butir informasi utama yang ada dalam laporan keuangan.

**b) Andal**

Laporan keuangan memuat informasi dan disajikan secara jujur, bisa diverifikasi dan dapat

dipertanggungjawabkan. Ciri khas yang dimiliki oleh informasi yang andal yaitu :

1) **Penyajian jujur**

Informasi dari transaksi dan peristiwa lain menggambarkan kejujuran dan wajar untuk disajikan.

2) **Dapat diverifikasi**

Penyajian laporan keuangan bisa diuji dan hasilnya menunjukkan kesimpulan yang tetap bila dilakukan oleh beberapa pihak.

3) **Netralitas**

Tidak berpihak pada pihak tertentu yang menyajikan informasi pada kebutuhan umum.

c) **Dapat dibandingkan**

Perbandingan laporan keuangan periode yang lalu dengan laporan keuangan entitas lain akan lebih bermanfaat. Perbandingan eksternal dilakukan bila penerapan kebijakan akuntansinya sama sedangkan perbandingan internal dilakukan dengan penerapan kebijakan akuntansi yang sama.

d) **Dapat dipahami**

Pengguna bisa memahami informasi yang ada pada penyajian laporan keuangan. Informasi dinyatakan dengan istilah dan diselaraskan dengan para pengguna.

Sebuah laporan keuangan yang bagus dan bisa berfaedah untuk penggunaannya bila disajikan dapat dipahami dan andal dan bisa dipertanggungjawabkan. Dapat dibandingkan untuk mengetahui kinerja keuangan instansi serta relevan sehingga pengguna dapat mengevaluasi untuk pengambilan keputusan kedepannya.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sangat diperlukan pada suatu instansi/organisasi. Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sebagai Empat unsur ciri khas dari kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

#### **2.1.6.5 Peranan Pelaporan Keuangan**

Transaksi dilaksanakan suatu instansi dalam satu periode dengan informasi yang relevan untuk mengetahui keadaan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dipakai agar bermanfaat dalam melakukan aktivitas operasional, mengevaluasi dan menilai kondisi keuangan serta

mematuhi peraturan perundang-undangan sebagai penjelasan dari PP Republik Indonesia no. 71 th 2010.

Usaha-usaha yang telah dikerjakan dengan hasil yang memenuhi target berkewajiban untuk dilaporkan secara sistematis dan terstruktur oleh setiap entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan sesuai dengan PP Republik Indonesia no. 71 th 2010 yaitu :

a) Akuntabilitas

Pelaksanaan kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan.

b) Manajemen

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bisa membantu pengguna suatu entitas pelaporan pada periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparasi

Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan asal daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam memberikan

informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

d) Keseimbangan antar generasi

Pembiayaan seluruh pengeluaran yang dialokasikan, diasumsikan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran dan membantu pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan.

e) Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja entitas pelaporan perlu dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang telah ditentukan yang dikelola oleh pemerintah.

Penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan antara lain laporan keuangan mempunyai peranan yang penting sehingga perlu dipertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaannya dalam periode tertentu. Manajemen dan evaluasi kinerja yang baik dapat membantu pengguna dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan. Memberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, serta menjaga keseimbangan antar generasi yang diasumsikan bahwa beban pengeluaran sebanding dengan penerimaan pemerintah.

### 2.1.6.6 Tujuan Pelaporan Keuangan

PP Republik Indonesia no. 71 th 2010 menyatakan bahwa penyajian informasi yang berfaedah buat pemakai dalam menilai pertanggungjawaban dan dalam mengambil keputusan. Keputusan ekonomi, social dan politik pada pelaporan keuangan pemerintah :

- a) Menyiapkan informasi mengenai asal, lokasi serta pemakaian asal dana keuangan.
- b) Menyiapkan informasi tentang kelayakan penerimaan masa berjalan dalam pembiayaan semua pengeluaran.
- c) Menyediakan informasi tentang total asal dana ekonomi yang dipakai untuk aktifitas entitas pelaporan juga Hasil-Hasil yang dipenuhi.
- d) Menyiapkan informasi tentang dana semua kegiatan dan kelayakan keperluan kas pada entitas pelaporan.
- e) Menyiapkan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan asal penerimaannya untuk jangka pendek dan jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f) Menyiapkan informasi semua aktifitas yang dilaksanakan dalam periode yang telah ditentukan tentang perubahan kedudukan keuangan entitas pelaporan terjadi peningkatan ataupun penurunan.

Kesimpulan bisa diambil dari penjelasan tersebut bahwa laporan keuangan dapat memberikan informasi tentang Asal,



alokasi, penggunaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan menyediakan informasi tentang asal dan pemakaian asal daya keuangan, pembiayaan, SILPA, transfer, SAL, LO dan LAK suatu entitas pelaporan.

#### **2.1.6.7 Komponen Laporan Keuangan**

Komponen ada 7 jenis dalam laporan keuangan sesuai PP Republik Indonesia no. 71 th 2010, ialah :

a. **Laporan Realisasi Anggaran / LRA**

Menyajikan laporan yang memuat asal anggaran dan penggunaannya untuk operasional pemerintah pusat maupun daerah, menampilkan dan membandingkan anggaran dan realisasi anggaran untuk pelaporan satu periode. Mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan dan transfer.

b. **Laporan Perubahan – Saldo Anggaran Lebih / LP-SAL**

Membandingkan saldo anggaran lebih tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang mencakup kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih. Memberikan ringkasan tentang pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai struktur LP-SAL yang sama.

c. Neraca

Neraca memuat aset, kewajiban dan ekuitas dana. aset, kewajiban dan ekuitas dana terlihat pada posisi keuangan entitas pelaporan.

d. Laporan Operasional / LO

Penyajian ikhtisar LO ada peningkatan ekuitas dan pemakaiannya yang dioperasikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Elemen di LO yaitu penerimaan / pendapatan LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa

e. Laporan Arus Kas / LAK

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Elemen yang dicakup LAK adalah penerimaan dan pengeluaran kas.

f. Laporan Perubahan Ekuitas / LPE

Penyajian LPE mencakup ekuitas awal atau ekuitas tahun lalu, surplus/ deficit LO periode berjalan dan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan

akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti : (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; (3) ekuitas akhir.

g. Catatan atas laporan Keuangan / CaLK

Penjelasan narasi yang memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipakai entitas pelaporan dan informasi lain yang diungkapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penyajian secara wajar pada laporan keuangan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu entitas pelaporan berkualitas atau tidak bisa dilihat pada penyusunan laporan keuangannya. Ditunjukkan dengan seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Memberikan penjelasan tentang posisi keuangan instansi dan bisa meminimalkan risiko pada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak tertentu.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu. Penelitian yang berhubungan dengan pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan.

Terlihat di tabel 2.1 ini :

Tabel 2.1  
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yunita Sari, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang  Juli - 2017	Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu)	Variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, informasi dan Komunikasi dan Pemantauan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu). Dengan persentase sumbangan pengaruh variabel Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

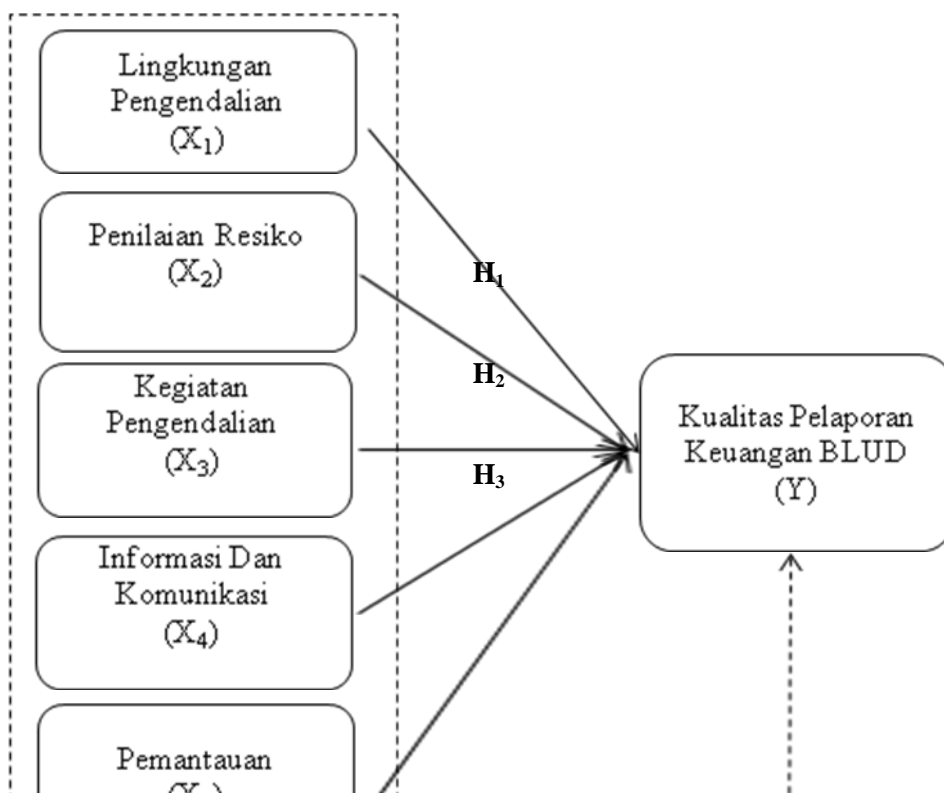
2	Lumongga, Institusi USU, Universitas Sumatera Utara  Juni 2017	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan
3	Dimas Rusvianto Sri Mulyani Indri Yuliafitri Universitas Padjajaran Bandung Juni 2018	Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Asal Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung)	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kompetensi Asal daya Manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung; Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung; Kompetensi Asal daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung
4	Wardani,  Deni Yuwilia, Fakultas Ekonomi  Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan  Juli 2017	Pengaruh Kompetensi  Asal Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  ( Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Labuhanbatu )	Secara parsial Kompetensi Asal Daya Manusia secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu; Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu; Pemanfaatan Teknologi Informasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu; Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu

5	Triyanti Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Juni 2017	Pengaruh Kompetensi Asal Daya Manusia Di Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kompetensi Asal Daya Manusia; Sistem Pengendalian Internal; Kompetensi Asal Daya Manusia
---	---	--	---

(Asal data : beberapa penelitian terdahulu)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Fungsi sistem pengendalian intern yaitu untuk melindungi asset pemerintah agar terjaga dengan baik dari kegiatann yang tidak diinginkan dan dapat merugikan Negara. Pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas baik atau tidak tergantung pada system pengendalian intern yang dimiliki. Pengendalian internal berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.



**H<sub>4</sub>**

**H<sub>5</sub>**

**H<sub>6</sub>**

gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

Penjelasan :

- : Pengaruh variable bebas // independen terhadap variable terikat / dependen secara parsial
- - ► : Pengaruh variabelbebas / independen terhadap variabelterikat / dependen secara Simultan

Variabel lingkungan pengendalian (X1) mempengaruhi terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan BLUD di Pusat Kesehatan Masyarakat (Y); Variabel Penilaian resiko (X2) mempengaruhi terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan BLUD di Pusat Kesehatan Masyarakat (Y); Variabel Kegiatan pengendalian (X3) mempengaruhi terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan BLUD di Pusat Kesehatan Masyarakat (Y); Variabel Informasi dan komunikasi (X4) mempengaruhi terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan BLUD di Pusat Kesehatan Masyarakat (Y); Variabel Pemantauan (X5) mempengaruhi terhadap variabel kualitas pelaporan

keuangan BLUD di Pusat Kesehatan Masyarakat (Y); Variabel Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan mempengaruhi terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2016) merupakan uraian sementara disebabkan jawaban yang diperlukan masih sesuai dengan teori. Hipotesis sebagai rumusan masalah penelitian yang menjadi jawaban sementara pada penelitian yang berupa pertanyaan.

### 2.4.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas.

Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian wajib dilakukan oleh kepala instansi dan semua pegawai instansi pemerintah. Perilaku baik dan tertib dengan menerapkan lingkungan pengendalian yang berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008.



Salah satu faktor dalam lingkungan pengendalian dalam kualitas pelaporan keuangan yaitu kompetensi Asal daya manusia, sehingga jika puskesmas mempunyai pegawai yang berkompeten dibidangnya masing-masing terutama bagian pengelola keuangan sehingga bisa menyusun laporan keuangan BLUD yang berkualitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008.

Hasil penelitian Sari (2017) menjelaskan Lingkungan Pengendalian tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit. Hasil penelitian Triyanti (2017) menerangkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hipotesis yang diajukan peneliti adalah :

**Ho1 : Lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap Kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas**

**Ha1 : Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap Kualitas pelaporan keuangan BLUD di Puskesmas**

#### **2.4.2 Pengaruh Penilaian Resiko terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas.**

Kegiatan penilaian terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang menghambat atau mengancam tercapainya tujuan dan sasaran instansi

pemerintah. Penetapan strategi operasional dan manajemen di instansi pemerintah untuk melaksanakan analisa resiko seluruh kegiatan terhadap sistem akuntansi yang dilanggar dan pelaporan keuangan BLUD. Agar mendapatkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008.

Hasil penelitian Sari (2017) menjelaskan bahwa Penilaian Resiko tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan BLUD di Rumah Sakit. Hasil penelitian Triyanti (2017) menerangkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Maka peneliti mengajukan hipotesis :

**Ho2 : Penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan BLUD di Puskesmas**

**Ha2 : Penilaian risiko berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan BLUD di Puskesmas**

#### **2.4.3 Kegiatan Pengendalian terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas.**

Mengatasi resiko diperlukan tindakan dalam pelaksanaan dan penetapan prosedur maupun kebijakan agar dalam menyelesaikan resiko dengan baik. Koordinasi seluruh aktifitas di puskesmas termasuk pelaporan keuangan BLUD dilakukan dengan kegiatan pengendalian sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian wajib dilakukan pimpinan sesuai tupoksi serta kompleksitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008.

Hasil penelitian Sari (2017) menguraikan bahwa Kegiatan Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit. Hasil penelitian Wardani (2017) menjelaskan bahwa Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pengajuan hipotesis peneliti adalah :

**Ho3 : Kegiatan pengendalian tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan BLUD di Puskesmas**

**Ha3 : Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan BLUD di Puskesmas**

#### **2.4.4 Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas.**

Data yang telah diolah bisa dipakai dalam mengambil keputusan untuk menyelenggarakan tupoksi instansi pemerintah yang merupakan bagian dari informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi harus dilakukan secara efektif, meliputi identifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi secara tepat. Informasi disajikan tepat waktu agar dilakukan tindakan korektif secara tepat. Laporan

keuangan yang berkualitas jika penyajian atas laporan keuangan BLUD tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008.

Hasil penelitian Sari (2017) menyatakan bahwa Informasi dan Komunikasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit. Hasil penelitian Triyanti (2017) menerangkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Maka peneliti mengajukan hipotesis :

**Ho4 : Informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas**

**Ha4 : Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas**

#### **2.4.5 Pengaruh Pemantauan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas.**

Proses penilaian untuk kualitas kerja system pengendalian internal dan proses yang bisa memberi keyakinan jika temuan audit segera ditindaklanjuti serta evaluasi lainnya merupakan kegiatan pemantauan yang wajib dilakukan instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008.

Pemantauan sistem pengendalian internal wajib dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemantauan pengendalian intern memperhatikan Hasil audit dan review atas semua aktifitas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008.

Hasil penelitian Sari (2017) menyatakan bahwa Pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit. Hasil penelitian Wardani (2017) menjelaskan bahwa Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Maka peneliti mengajukan hipotesis :

**Ho5 : Pemantauan berpengaruh tidak terhadap kualitas pelaporan keuangan BLUD di Puskesmas**

**Ha5 : Pemantauan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan BLUD di Puskesmas**

#### **2.4.6 Pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas.**

Laporan keuangan yang baik terjadi bila system pengendalian internnya berjalan dengan baik. Lima (5) elemen pada pengendalian

internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008.

Hasil penelitian Sari (2017) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan Pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit. Hasil penelitian Wardani (2017) menjelaskan bahwa Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pengajuan hipotesis peneliti adalah :

**Ho6 : Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan tidak terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas**

**Ha6 : Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan Pemantauan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas.**